



Pemerintah
Kalurahan
Gari

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN GARI

TAHUN 2025

Disusun Oleh:

- Tim Penyusun
RKP Kalurahan
Gari





PERATURAN KALURAHAN GARI
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP Kal) GARI
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GARI

- Menimbang : a bahwa agar dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan dapat berjalan dengan efektif, efisien, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintah kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) untuk Tahun 2025;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Gari Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 - 2025;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 - 2026;
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 16 Seri E);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014, tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 18);

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 tahun 2019;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul;
20. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025;
21. Peraturan Kalurahan Gari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa;
22. Peraturan Kalurahan Gari No 5 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) tahun 2022-2027;
23. Peraturan Kalurahan Gari Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pungutan Kalurahan;

Dengan persetujuan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GARI

Dan

LURAH GARI

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKal) GARI TAHUN 2025**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan

1. Kalurahan adalah Kalurahan Gari
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BAMUSKAL adalah BAMUSKAL Gari
5. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kal, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
7. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
8. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat MUSKAL adalah musyawarah antara BAMUSKAL, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BAMUSKAL untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disingkat MUSRENBANGKAL adalah musyawarah antara BAMUSKAL, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Kalurahan yang didanai oleh APB Kal, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau APBD.
10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BAMUSKAL.
11. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
12. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan BAMUSKAL dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kalurahan dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Lurah

dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

4. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
5. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kalurahan.
6. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Kalurahan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kal, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kal, adalah penjabaran dari RPJM Kal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Daftar Usulan RKP Kal yang selanjutnya disingkat DU RKP adalah penjabaran RPJM Kal yang menjadi bagian dari RKP Kal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi ;
13. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan

BAB II RKP KALURAHAN

Pasal 2

1. RKP Kalurahan disusun dalam rangka pelaksanaan RPJM Kalurahan;
2. RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk Tahun 2025;
3. RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas;
4. RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun melalui MUSRENBANGKAL.

Pasal 3

RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi pemerintah Kalurahan dan seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan dalam menyusun kegiatan yang dituangkan dalam APB Kalurahan

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Lurah melakukan pengendalian pelaksanaan RKP Kalurahan.
- (2) Lurah melakukan evaluasi pelaksanaan RKP Kalurahan.

BAB IV PENUTUP

Pasal 6

Jika dipandang perlu, Lurah dapat menetapkan Keputusan Lurah guna melaksanakan Peraturan Kalurahan ini

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Kalurahan ini Peraturan Kalurahan nomor 5 tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Kalurahan ini berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatan dalam Lembaran Kalurahan Gari Kapaneon Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan : di Gari

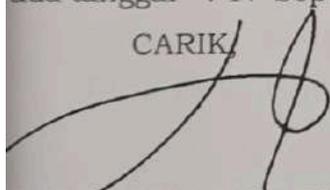
Pada tanggal : 17 September 2024



Diundangkan : di Gari

Pada tanggal : 17 September 2024

CARIK



LILIK RAHMAD PURNOMO

LEMBARAN KALURAHAN GARI NOMOR 4 TAHUN 2024

BERITA ACARA
RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAHAN KALURAHAN GARI
DAN BAMUSKAL GARI,
KAPANEWON WONOSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh belas bulan September tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor/Balai Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, telah diadakan Rapat/Sidang bersama, antara Pemerintahan Kalurahan Gari dan Bamuskal dalam rangka membahas tentang:

- Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Gari Tahun Anggaran 2025

Rapat /Sidang bersama antara Pemerintahan Kalurahan Gari dan Bamuskal sebagaimana dalam daftar hadir terlampir. Dalam rapat tersebut telah diperoleh kesepakatan/mufakat sebagai berikut:

1. Menetapkan Peraturan Kalurahan Gari Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Gari Tahun Anggaran Tahun 2025

Atas kesepakatan bersama Pemerintah Kalurahan dengan Bamuskal sesuai dengan petunjuk/aturan yang berlaku maka dibuat beberapa Peraturan Kalurahan, untuk pedoman didalam pelaksanaan tugas Pemerintahan Kalurahan Gari

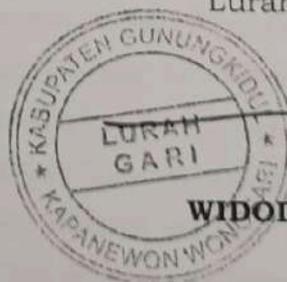
Ketua Bamuskal

7.3

HERI SANTOSO, S.Pd

Gari, 17 September 2024

Lurah Gari



WIDODO, S.IP

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kalurahan Gari, sebagai bagian integral dari Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2025 menjadi langkah penting dalam mewujudkan perencanaan tersebut. RKPKal ini berisi program prioritas dan Daftar Usulan (DU) RKPKal yang meliputi berbagai usulan kegiatan yang dibiayai dari berbagai sumber pendanaan, seperti APBD Kabupaten, APBD Provinsi DIY, APBN, dan Dana Keistimewaan (DAIS).

Perencanaan pembangunan di Kalurahan Gari berpedoman pada berbagai regulasi nasional, di antaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua undang-undang tersebut menekankan pentingnya keterkaitan dan keselarasan perencanaan pembangunan di tingkat nasional, daerah, dan kalurahan.

Penyusunan RKPKal Gari Tahun 2025 juga mengacu pada Peraturan Kalurahan Gari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2022 – 2028. RKP Kalurahan ini merupakan penjabaran dari RPJMKal yang memasuki tahun keempat implementasinya. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKP Kalurahan berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan di Kalurahan Gari.

Setelah dirumuskan oleh Tim Penyusun, Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Gari akan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dan Lurah. Selanjutnya, RKP Kalurahan ini menjadi dasar bagi penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025. Dengan demikian, RKP Kalurahan Gari Tahun 2025 menjadi dokumen strategis yang memberikan arah dan fokus prioritas pembangunan Kalurahan Gari di tahun mendatang.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025;
17. Peraturan Kalurahan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Desa
18. Peraturan Kalurahan Gari Nomor 5 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) tahun 2022-2028
19. Peraturan Kalurahan Gari Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan;

C. Tujuan

1. Sebagai kerangka acuan bagi pemerintah kalurahan dalam menyusun program dan kegiatan tahunan dalam mewujudkan visi-misi yang telah ditetapkan dalam RPJM Kalurahan Periode 2022-2028;
2. Sebagai instrumen penilaian kinerja pamong kalurahan dalam mengukur efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan serta menetapkan prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam RPJM Kalurahan Gari;
3. Sebagai instrumen dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan baik oleh masyarakat maupun elemen pemerhati pemerintah yang berkepentingan memantau kinerja pemerintah Kalurahan Gari.
4. Memberikan gambaran mengenai proyeksi keuangan kalurahan tahun 2025 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk beban belanja dan pembiayaan pembangunan Kalurahan;
5. Memberikan arah bagi seluruh *stakeholder* pembangunan dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi aktif dalam pembangunan kalurahan;
6. Sebagai instrumen dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan (IPPKal).

D. Visi dan Misi Kalurahan

1. Visi Kalurahan Gari

- **TERWUJUDNYA KALURAHAN GARI YANG NYAWIJI, BASWARA
ING MERCAPADA**

2. Misi Kalurahan Gari

- a. Mengoptimalkan kinerja pamong Kalurahan secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi, serta melaksanakan koordinasi demi tercapainya pemerintahan yang akuntabel serta pelayanan yang mudah, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
- b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui internet Desa.
- c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga, serta memberikan ruang yang ideal bagi pemuda untuk berkarya membangun Kalurahan.
- d. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- e. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta melestarikan budaya dan nilai-nilai luhur yang mendesa.
- f. Menjadikan padukuhan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
- g. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa/ Kalurahan menuju Desa Mandiri.

BAB II.

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah

1. Kondisi Geografis

a. Kalurahan Gari merupakan bagian dari wilayah administrasi Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut adalah posisi geografis Kalurahan Gari berdasarkan batas-batas wilayahnya:

- Sebelah Utara : Kalurahan Kedungkeris, Kapanewon Nglipar
- Sebelah Barat : Kalurahan Gading, Kapanewon Playen
- Sebelah Selatan : Kalurahan Piyaman, Kapanewon Wonosari
- Sebelah Timur : Kalurahan Karangtengah, Kapanewon Wonosari

b. Kalurahan Gari memiliki posisi strategis dalam hubungannya dengan pusat pemerintahan daerah yang dijabarkan dalam orbitasi sebagai berikut:

- Jarak ke Ibu Kota Kapanewon : 6 km
- Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 6 km
- Jarak ke Ibu Kota Provinsi : 34 km

c. Jumlah penduduk yang berprofesi sebagai **Petani** di Kalurahan Gari adalah 2.041 Kepala Keluarga (KK), dengan luas lahan pertanian menurut komoditas adalah sebagai berikut:

NO	KOMODITAS	LUAS
1	Jagung	61,60 Ha
2	Kacang Kedelai	82,30 Ha
3	Kacang Tanah	33,00 Ha
4	Padi Sawah	0,47 Ha
6	Ubi Kayu	23,00 Ha

d. Populasi **Ternak** di Kalurahan Gari adalah sebagai berikut:

NO	TERNAK	JUMLAH
1	Sapi	715 ekor
2	Ayam kampung	1600 ekor
3	Kambing	1042 ekor

2. Perekonomian Desa

Kalurahan Gari, yang terletak di bagian utara Kapanewon Wonosari, memiliki potensi alam yang didominasi oleh lahan pertanian subur. Hal ini menyebabkan sebagian besar penduduk setempat menggantungkan hidupnya sebagai petani. Pertanian di Kalurahan Gari tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan lokal, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian desa secara signifikan.

Selain sektor pertanian, Kalurahan Gari telah mengembangkan beberapa spot pasar desa yang menjadi pusat kegiatan ekonomi warga. Kehadiran pasar ini telah membuka peluang baru bagi masyarakat, menciptakan profesi pedagang yang semakin berkembang. Setiap bulannya, transaksi jual beli di pasar desa mampu menghasilkan perputaran uang yang mencapai hingga 200 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pasar desa Kalurahan Gari bukan hanya sebagai tempat transaksi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal yang signifikan.

Dengan kombinasi antara sektor pertanian dan aktivitas perdagangan, Kalurahan Gari memiliki potensi besar untuk terus mengembangkan perekonomiannya, menjadikan desa ini sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi lokal di Kapanewon Wonosari.

Kalurahan Gari juga telah membentuk Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) bernama "Mardi Gemi" pada tahun 2016 dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat setempat. BUMKal ini mengelola tiga unit usaha yang beragam, yaitu Pasar Ekologis Argowijil, Internet Berdesa "DEGANET," dan Bumi Watu Obong (BWO) Café & Resto.

Pasar Ekologis Argowijil berperan sebagai pusat perdagangan berbasis ekologi, memfasilitasi masyarakat dalam memasarkan produk lokal yang ramah lingkungan dan mendukung pertanian berkelanjutan. Sedangkan, Internet Berdesa "DEGANET" menyediakan akses internet yang terjangkau bagi masyarakat desa, membantu mereka terhubung dengan dunia luar dan meningkatkan literasi digital di kalangan warga. Sementara itu, Bumi Watu Obong (BWO) Café & Resto menjadi opsi wisata kuliner yang memanfaatkan keindahan alam lokal, menawarkan pengalaman makan yang unik sekaligus memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan usaha.

BUMKal Mardi Gemi tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi bagi Kalurahan Gari, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang signifikan melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi lokal. Sejak tahun 2021, BUMKal ini telah mendapatkan sertifikat badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk operasional dan pengembangan usaha ke depannya. Dengan adanya BUMKal, diharapkan peluang kerja bagi warga Kalurahan Gari terus bertambah, yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan penguatan ekonomi desa.

Data penduduk Kalurahan Gari berdasarkan pekerjaan adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani	974 orang
2	Buruh Tani	23 orang
3	PNS	99 orang
4	Perawat	5 orang
5	TNI/Polri	11 orang
6	Seniman	9 orang
7	Pedagang keliling	3 orang
8	Tukang Kayu/Batu	4 orang
9	Pembantu Rumah Tangga	2 orang
10	Karyawan swasta	390 orang
11	Karyawan BUMN/D	17 orang
12	Wiraswasta	694 orang
13	Tidak Punya pekerjaan tetap	927 orang
14	Pelajar	1375 orang
15	Ibu Rumah Tangga	1092 orang
16	Pamong kalurahan	20 orang
17	Buruh Harian Lepas	895 orang
18	Anggota Legislatif	3 orang

3. Sosial Budaya

Wilayah Kalurahan Gari meskipun termasuk dalam Kapanewon Wonosari yang menjadi Ibu Kota Kabupaten namun berada di wilayah pedesaan karena berada disisi utara dan berbatasan langsung dengan Kapanewon Nglipar, kegiatan sosial kemasyarakatan masih kental dengan sifat gotong-royong sesama warga masyarakat, toleransi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan.

Berbagai kegiatan sosial dan budaya menjadi agenda rutin yang setiap tahun dilaksanakan seperti Rasulan (Bersih Desa), upacara adat dan lain sebagainya, Kalurahan Gari masuk dalam kategori Kalurahan Rintisan Budaya.

Kebudayaan merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan daerah. Dalam kehidupan sehari-hari antara manusia dengan kebudayaan terjalin hubungan yang erat, karena manusia merupakan bagian dari hasil kebudayaan itu sendiri.

Potensi Budaya yang dimiliki berupa ragam budaya lokal antara lain potensi adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya. Ragam budaya yang dimiliki Kalurahan Gari adalah sebagai berikut:

a. Adat dan tradisi:

- Rasulan
- Bersih (Merti) Kali
- Gumbregan
- Kenduren

b. Kesenian dan permainan rakyat

- Ragam Kesenian:

✓ Wayang Cakruk Purbo Laras	✓ Karawitan Pedalangan Ghautama
✓ Wayang Cakruk Mudha Laras	✓ Teater Tradisi Waton Gayeng
✓ Rebana Tamba Ati	✓ Campursari Islami Sekar Djagat
✓ Doger Cepaplok	✓ Reog Manggala Mudo Utomo
✓ Jathil Satrio Kencono	✓ Jathil Jagaraga Kudha Satriya
✓ Campursari Gocek	✓ Jathil Trimu Lowong
✓ Jathil Turunggo Bekso	✓ Karawitan Purbolaras
✓ Jathil Mekar Pandega	✓ Gejog Lesung Alu Wirama
✓ Campursari Bayu Aji	✓ Ledek Luwes
✓ Rebana Al-Amin	✓ Doger Mego Raras
✓ Rebana Alfajar	✓ Rebana Aisyah Al-Iklas
✓ Reog Eko Proyo	✓ Thek – Thek Lamsari

- Ragam Permainan rakyat:

✓ Gobak Sodor	✓ Dhingklik Oglak Aglik
✓ Benthik	✓ Jamuran
✓ Egrang	✓ Dakon
✓ Gatheng	•

- Kerajinan, Kuliner dan pengobatan tradisional

- ✓ Wayang Kulit omah wayang Ghautama
- ✓ Kerajinan ukir batu Arupa Datu
- ✓ Anyaman enceng gondok dan gedebok Marsudi Makmur
- ✓ Kerajinan ukir batu Batu Mulia
- ✓ Kerajinan gamelan kecil/mini UD Wagiran
- ✓ Ukir batu UD Triyanto
- ✓ Kerajinan tenggok keranjang Anyaman Pak Kasman
- ✓ Kuliner tempe bingkil, sambel cabuk, minyak wijen, tape ketan, tape telo, pecel, getuk kimpol, legondo, tempe bengok, kupat tahu, emping mlinjo.

- Pemanfaatan bahasa dan sastra
 - ✓ Cerita Rakyat: Sendang Kaliripan, Banyu Sumurup, Nyai Gelung, Kadipaten Ngimbang, Asu Gunung Wijil, Gunung Cilik, Deplokan, Kali Gede.
 - ✓ Kelompok Macapatan: Purwo Laras dan Sendang Laras
 - ✓ Pemanfaatan bahasa dan sastra: penggunaan bahasa jawa dalam setiap pertemuan warga, penggunaan tulisan jawa dalam papan nama kalurahan dan ruangan,
- Peninggalan warisan budaya
 - Ompak Joglo Ngimbang,
 - Sumur Kuno dan Resan Ngembes,
 - Sumber Air dan Resan Kali Gede,
 - Sumber Air dan Resan Kali Gari,
 - Sumber Air dan Resan Kali Ripan,
 - Sumber Air dan Resan Kali Gelung; serta
 - Sumber Air Dan Resan Belik Ngelorejo.

B. Kebijakan Keuangan Kalurahan

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang atau jasa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan. Pengelolaan Keuangan Kalurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kalurahan.

Kebijakan Keuangan Pemerintah Kalurahan Gari mendasarkan pada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif dan dilaksanakan secara Tertib dan Disiplin Anggaran. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Prinsip pengelolaan keuangan dilakukan dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalurahan dan pembangunan yang berkelanjutan.

1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi semua penerimaan dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah kalurahan. Sumber pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dan Pendapatan lain-lain. Rencana pendapatan kalurahan disusun berdasarkan perkiraan yang terukur, rasional, dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) diawali dengan proses Musyawarah Kalurahan (Muskal) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal). Hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) yang menjadi dasar penyusunan APBKal.

Kebijakan Pendapatan Kalurahan Gari Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Kalurahan yang dianggarkan dalam APBKal merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
- b. PAD dihitung dengan memperhatikan perkembangan pendapatan selama dua tahun terakhir, serta prakiraan masing-masing potensi jenis lain-lain PAD.
- c. Penerimaan transfer, seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak/Retribusi, dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK), dihitung dengan mempertimbangkan nilai pendapatan tahun 2023 dan 2024.
- d. Pendapatan lain-lain dihitung berdasarkan sumber-sumber pendapatan yang sudah dapat dipastikan, seperti bagi hasil Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal), penghasilan aset kalurahan, dan pendapatan sah lainnya.

Data target penerimaan pendapatan kalurahan tahun 2023, 2024 dan proyeksi pada tahun perencanaan 2025 seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
PROYEKSI PENDAPATAN ASLI KALURAHAN, PAGU INDIKATIF KELOMPOK
TRANSFER DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN

KALURAHAN : GARI
KAPANEWON : WONOSARI
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kode Rekening	URAIAN	Tahun	
		Berjalan (n/2024)	Proyeksi (n-1/2025)
1.	Pendapatan		
1.1.1	Hasil Usaha Kalurahan	Rp 15.000.000	Rp 30.000.000
1.1.2	Hasil Aset Kalurahan	Rp 5.000.000	Rp 12.182.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp 13.000.000	Rp 20.000.000
1.2.1	Dana Desa	Rp 1.200.000.000	Rp 1.200.000.000
1.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp 672.915.000	Rp 706.560.000
1.2.2	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 57.000.000	Rp 80.000.000
1.2.4.1	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp 400.000.000	Rp 400.000.000
1.2.4.2	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp 500.000.000	Rp -
1.3.6	Pendapatan Lain - lain	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
JUMLAH		Rp 2.912.915.000	Rp 2.498.742.000

2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Kebijakan Belanja Kalurahan tentu telah menjadi sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kalurahan. Belanja Kalurahan adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, belanja Kalurahan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan Kalurahan yang diklasifikasikan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, bidang pelaksanaan pembangunan Kalurahan, bidang pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, bidang pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBKal harus lebih fokus terhadap bidang, sub bidang dan kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi Kalurahan. Pemerintah Kalurahan menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam bidang, sub bidang dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan

akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Perencanaan bidang, sub bidang dan kegiatan hams memberikan informasi yang jelas dan temkur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari bidang, sub bidang dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Terkait dengan Kebijakan Belanja Kalurahan Gari pada Tahun Perencanaan 2025 tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2024 yang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Percepatan pencapaian target Indeks Desa Membangun (IDM);
- b. Pembangunan infrastruktur prioritas penunjang investasi dan pariwisata;
- c. Percepatan penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- d. Percepatan penurunan stunting;
- e. Optimalisasi kegiatan ketahanan pangan;
- f. Peningkatan investasi kalurahan;
- g. Pengendalian AIDS, Tuberculosis, Malaria serta penyakit menular lainnya;
- h. Perwujudan reformasi kalurahan;
- i. Pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasayarakatan kalurahan;
- j. Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana.

Arah kebijakan belanja kalurahan tahun 2025 pada RKPKal menyesuaikan dengan proyeksi pelaksanaan belanja tahun sebelumnya seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Belanja Kalurahan Gari Tahun 2024

Urusan/Kegiatan	Tahun		Ket
	Berjalan	Proyeksi	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	Rp 30.595.600	Rp 44.500.000	
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 395.999.600	Rp 577.010.000	
Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 26.993.026	Rp 44.736.120	
Operasional Pemerintahan Desa	Rp 34.052.492	Rp 61.326.080	
Tunjangan BPD	Rp 37.350.000	Rp 53.950.000	
Operasional BPD	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	
Insentif RT dan RW	Rp 13.200.000	Rp 39.600.000	
Operasional Pemerintah Desa bersumber dari Dan Desa	Rp 12.200.000	Rp 39.800.000	
Pengadaan Peralatan Kerja	Rp -	Rp 20.000.000	
Pengadaan Mebeul	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	
Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 1.684.000	Rp 3.500.000	
Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	Rp 3.675.000	Rp 4.500.000	
Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Rp 20.800.000	Rp 30.000.000	
Penyusunan Monografi Desa	Rp -	Rp 1.300.000	
Penyelenggaraan Musyawrah Perencanaan Desa	Rp -	Rp 2.300.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDDes)	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	
Penyusunan dokumen Keuangan Desa (APBKal)	Rp -	Rp 2.000.000	
Penyusunan laporan Kepala Desa	Rp 3.100.000	Rp 3.100.000	
Pengembangan Sistem Informasi Desa	Rp 3.375.000	Rp 5.796.950	
Pengisian Perangkat Desa	Rp 19.175.000	Rp 19.250.000	
Penghargaan Purna Tugas (Dukuh Gondangrejo)	Rp 11.375.000	Rp 11.375.000	
Pengadaan Pakaian Dinas	Rp -	Rp 4.400.000	
Intensifikasi Pemungutan pajak Daerah/PBB	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	

Bidang Pembangunan Desa			
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/Madrasah non Formal Milik Desa	Rp 18.400.000	Rp 35.300.000
2	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Rp 1.800.000	Rp 2.400.000
3	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	Rp 40.800.000	Rp 55.200.000
4	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Rp -	Rp 5.500.000
5	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 6.000.000	Rp 20.000.000
6	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Rp 2.980.000	Rp 3.180.000
7	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	Rp 6.000.000	Rp 12.000.000
8	Pembinaan dan Pengembangan Kampung KB	Rp -	Rp 2.378.050
9	Insentif Kader Kesehatan/KB	Rp 44.160.000	Rp 66.240.000
10	Pemeliharaan gedung/Prasarana Balai kemasyarakatan	Rp -	Rp 132.950.000
11	Pembangunan Jalan Lingkungan	Rp 29.750.000	Rp 196.550.000
12	Pembangunan Jalan Usaha tani	Rp 118.739.000	Rp 151.675.000
13	Pembangunan Talud Drainase	Rp 209.066.000	Rp 331.950.000
14	Pembangunan Alur-Alun Kalurahan Gari	Rp 175.000.000	Rp 175.000.000
15	Pembangunan RTLH	Rp 49.025.000	Rp 51.675.000
16	Pembangunan Sumur Bor	Rp 95.201.000	Rp 128.750.000
17	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Rp 2.000.000	Rp 3.500.000
18	Pembuatan Peta Potensi Desa	Rp 62.315.608	Rp 63.595.000
19	Pengembangan Pariwisata tingkat Desa	Rp -	Rp 2.500.000
II Bidang Pembinaan Masyarakat			
1	Pelatihan Linmas Kalurahan Gari	Rp -	Rp 3.300.000
2	Pelaksanaan Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Rp -	Rp 3.250.000
3	sarana prasaran pendukung persiapan bencana	Rp -	Rp 12.800.000
4	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000
5	Pemberian Stimulan Kegiatan Keagamaan	Rp 7.200.000	Rp 7.200.000
6	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Rp -	Rp 3.000.000
7	Pembangunan/rehabilitasi Fasilitas Olahraga	Rp 110.360.000	Rp 103.675.000
8	Operasional Karang Taruna	Rp -	Rp 4.000.000
9	Pembinaan LPMK	Rp 2.500.000	Rp 2.000.000
10	Pembinaan PKK	Rp 30.600.000	Rp 30.600.000
11	Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	Rp 1.700.000	Rp 7.500.000
12	Operasional LPMK	Rp -	Rp 4.000.000
13	Operasional PKK	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
IV Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
1	Penguatan Ketahanan Pangan	Rp 67.192.500	Rp 69.175.000
2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp -	Rp 3.000.000
3	Peningkatan Kapasitas BAMUSKAL	Rp -	Rp 2.000.000
4	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable	Rp -	Rp 3.250.000
5	Pembinaan dan Pengembangan Forum Anak	Rp 1.000.000	Rp 5.000.000
6	Penyelenggaraan Pameran Pembangunan/Promosi UMKM	Rp -	Rp 10.000.000
7	Pembinaan UMKM	Rp -	Rp 4.300.000
V Bidang Penanggulangan Bencana			
1	Penanggulangan Keadaan Kebencanaan	Rp 8.900.000	Rp 15.000.000
2	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 133.200.000	Rp 152.000.000

3. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pembiayaan kalurahan didefinisikan sebagai semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan pembiayaan Kalurahan Gari Tahun 2025 disusun sebagai instrumen fiskal yang komprehensif dan terintegrasi dengan kebijakan pendapatan dan belanja kalurahan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya keuangan kalurahan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Gari Tahun 2022-2027.

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

SiLPA Tahun 2024 merupakan selisih lebih realisasi pendapatan atas realisasi belanja, diproyeksikan sebesar **Rp 83.586.400** dan dialokasikan untuk Pembangunan Lapangan Futsal yang berada di Kawasan Alun-Alun kalurahan Gari dalam rangka memberikan fasilitas dan layanan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal sebesar Rp 100.000.000 kepada BUMKal Mardi Gemi Gari yang memiliki beberapa unit usaha yakni Pasar Ekologis Argowiji, Deganer, dan BWO Papan Srawung. Bertujuan untuk meningkatkan kualitas alat dan pelayanan kepada customer. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli kalurahan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.3. Pembiayaan Kalurahan Gari Tahun 2024

KALURAHAN : GARI
 KAPANEWON : WONOSARI
 KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
 PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kode Rekening	URAIAN	Tahun			Ket
		Realisasi (n+1/2023)	Berjalan (n/2024)	Proyeksi (n-1/2025)	
3.	Pembiayaan				
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 97.617.488	Rp 83.586.400	Rp 83.586.400	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	Rp. 97. 617. 488	Rp 83.586.400	Rp 83.586.400	
3.1.2.	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan		Rp 0	Rp 0	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
3.2.1.	Pembentukan dana Cadangan	0	Rp 0	Rp 0	
3.2.2.	Penyertaan modal desa	Rp. 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	

3.3.	Selisih Pembiayaan	Rp. (2.3.82.512)	Rp (16.413.600)	Rp (16.413.600)	
------	--------------------	------------------	-----------------	-----------------	--

Pembiayaan kalurahan merupakan bagian dari struktur APBKal sebagai penyeimbang antara pendapatan dan belanja kalurahan. Pemerintah kalurahan dalam Tahun Anggaran 2024 merumuskan kebijakan pembiayaan kalurahan untuk mampu menutupi ataupun menyeimbangkan antara belanja Desa dan pendapatan Desa, sehingga dengan demikian segala kebutuhan ataupun defisit anggaran belanja dapat tertutupi dari pembiayaan, khususnya dari kelompok pembiayaan penerimaan Desa.

c. Strategi Pencapaian

Dalam upaya pencapaian sasaran ataupun target rancangan struktur APB Desa Tahun 2024, baik yang menyangkut Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Desa, maka Pemerintah Desa mengembangkan strategi sebagai berikut :

1. Identifikasi dan penggalian sumber-sumber pendapatan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
2. Pengkajian dan penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Desa;
3. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah atasan guna meningkatkan sumber-sumber pendapatan Desa;
4. Menyusun dan memantapkan indikator kinerja program kegiatan pembangunan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APB Desa;
5. Meningkatkan partisipasi/pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan swadaya partisipasi dan gotong royong;
6. Program Nabati dan hewani untuk membatu menekan laju inflasi daerah dan membantu kesediaan pangan nasional;
7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan peternakan yang mandiri berkelanjutan;
8. Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk sebagai jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut dan difabel sebagai pemulihan ekonomi nasional dan penanggulangan kemiskinan ekstrim.

BAB III.
EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN

A. Evaluasi Pelaksanaan Program RKP Kalurahan

Evaluasi pelaksanaan program RKP Kalurahan memuat review terhadap perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n), mengacu pada APBKal tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan capaian target RKP Kalurahan berdasarkan realisasi program dan kegiatan seperti tabel 3.1 (n/2024) dan tabel 3.2 (n+1/2023) Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan dibawah ini:

Tabel 3.1
Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Gari Tahun 2024

NO	Urusan/Kegiatan	Lokasi	Target capaian Tahun 2024	Realisasi Capaian s/d Akhir Agustus 2024	Proyeksi Realisasi Capaian s/d akhir Tahun 2024	Sumber APBKal	Ket	SDGS
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa							
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	Kal. Gari	Rp 44.500.000	Rp 30.595.600	100%	ADD		
2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kal. Gari	Rp 577.010.000	Rp 395.999.600	100%	ADD		
3	Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kal. Gari	Rp 44.736.120	Rp 26.993.026	100%	ADD		
4	Operasional Pemerintahan Desa	Kal. Gari	Rp 61.326.080	Rp 34.052.492	100%	ADD, PBH, PAD, PBK		
5	Tunjangan BPD	Kal. Gari	Rp 53.950.000	Rp 37.350.000	100%	ADD		
6	Operasional BPD	Kal. Gari	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	100%	PAD		
7	Insentif RT dan RW	Kal. Gari	Rp 39.600.000	Rp 13.200.000	100%	ADD, PBH		
8	Operasional Pemerintah Desa bersumber dari Dan Desa	Kal. Gari	Rp 39.800.000	Rp 12.200.000	100%	DDS		
9	Pengadaan Peralatan Kerja	Kal. Gari	Rp 20.000.000	Rp -	100%	PAD		
10	Pengadaan Mebeul	Kal. Gari	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	100%	PBH		
11	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kal. Gari	Rp 3.500.000	Rp 1.684.000	100%	PBH		

1 2	Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	Kal. Gari	Rp 4.500.000	Rp 3.675.000	100%	PAD		
1 3	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Kal. Gari	Rp 30.000.000	Rp 20.800.000	100%	DDS		
1 4	Penyusunan Monografi Desa	Kal. Gari	Rp 1.300.000	Rp -	100%	PAD		
1 5	Penyelenggaraan Musyawrah Perencanaan Desa	Kal. Gari	Rp 2.300.000	Rp -	100%	PBH		
1 6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes)	Kal. Gari	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	100%	PBH		
1 7	Penyusunan dokumen Keuangan Desa (APBKal)	Kal. Gari	Rp 2.000.000	Rp -	100%	PAD		
1 8	Penyusunan laporan Kepala Desa	Kal. Gari	Rp 3.100.000	Rp 3.100.000	100%	PBH		
1 9	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kal. Gari	Rp 5.796.950	Rp 3.375.000	100%	DDS		
2 0	Pengisian Perangkat Desa	Kal. Gari	Rp 19.250.000	Rp 19.175.000	100%	ADD		
2 1	Penghargaan Purna Tugas (Dukuh Gondangrejo)	Kal. Gari	Rp 11.375.000	Rp 11.375.000	100%	ADD		
2 2	Pengadaan Pakaian Dinas	Kal. Gari	Rp 4.400.000	Rp -	100%	PBK		
2 3	Intensifikasi Pemungutan pajak Daerah/PBB	Kal. Gari	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	100%	PBK		
II Bidang Pembangunan Desa								
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/ Madrasah non Formal Milik Desa	Kal. Gari	Rp 35.300.000	Rp 18.400.000	100%	DDS		
2	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Kal. Gari	Rp 2.400.000	Rp 1.800.000	100%	DDS		
3	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	Kal. Gari	Rp 55.200.000	Rp 40.800.000	100%	DDS		
4	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Kal. Gari	Rp 5.500.000	Rp -	100%	DDS		
5	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Kal. Gari	Rp 20.000.000	Rp 6.000.000	100%	DDS		
6	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Kal. Gari	Rp 3.180.000	Rp 2.980.000	100%	DDS		
7	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	Kal. Gari	Rp 12.000.000	Rp 6.000.000	100%	DDS		
8	Pembinaan dan Pengembangan Kampung KB	Kal. Gari	Rp 2.378.050	Rp -	100%	DDS		

0	Insentif Kader Kesehatan/KB	Kal. Gari	Rp 66.240.000	Rp 44.160.000	100%	DDS		
10	Pemeliharaan gedung/Prasarana Balai kemasyarakatan	Kal. Gari	Rp 132.950.000	Rp -	100%	PBK,P BP		
11	Pembangunan Jalan Lingkungan	Kal. Gari	Rp 196.550.000	Rp 29.750.000	100%	PBK		
12	Pembangunan Jalan Usaha tani	Kal. Gari	Rp 151.675.000	Rp 118.739.000	100%	DDS,P BK		
13	Pembangunan Talud Drainase	Kal. Gari	Rp 331.950.000	Rp 209.066.000	100%	PBK,D DS		
14	Pembangunan Alun-Alun Kalurahan Gari	Kal. Gari	Rp 175.000.000	Rp 175.000.000	100%	PBP		
15	Pembangunan RTLH	Kal. Gari	Rp 51.675.000	Rp 49.025.000	100%	DDS		
16	Pembangunan Sumur Bor	Kal. Gari	Rp 128.750.000	Rp 95.201.000	100%	DDS		
17	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Kal. Gari	Rp 3.500.000	Rp 2.000.000	100%	DDS		
18	Pembuatan Peta Potensi Desa	Kal. Gari	Rp 63.595.000	Rp 62.315.608	100%	DDS		
19	Pengembangan Pariwisata tingkat Desa	Kal. Gari	Rp 2.500.000	Rp -	100%	DDS		

III	Bidang Pembinaan Masyarakat							
1	Pelatihan Linmas Kalurahan Gari	Kal. Gari	Rp 3.300.000	Rp -	100%	PBK		
2	Pelaksanaan Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Kal. Gari	Rp 3.250.000	Rp -	100%	DDS		
3	sarana prasaran pendukung persiapan bencana	Kal. Gari	Rp 12.800.000	Rp -	100%	DDS		
4	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	Kal. Gari	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	100%	PBH		
5	Pemberian Stimulan Kegiatan Keagamaan	Kal. Gari	Rp 7.200.000	Rp 7.200.000	100%	PBH		
6	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Kal. Gari	Rp 3.000.000	Rp -	100%	DLL		
7	Pembangunan/rehabilitasi Fasilitas Olahraga	Kal. Gari	Rp 103.675.000	Rp 110.360.000	100%	DDS		
8	Operasional Karang Taruna	Kal. Gari	Rp 4.000.000	Rp -	100%	PBH		
9	Pembinaan LPMK	Kal. Gari	Rp 2.000.000	Rp 2.500.000	100%	PBK		
10	Pembinaan PKK	Kal. Gari	Rp 30.600.000	Rp 30.600.000	100%	DDL		
11	Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	Kal. Gari	Rp 7.500.000	Rp 1.700.000	100%	DDS		
12	Operasional LPMK	Kal. Gari	Rp 4.000.000	Rp -	100%	PBH		

Operasional PKK	Kal. Gari	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	100%	PBH	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
Penguatan Ketahanan Pangan	Kal. Gari	Rp 69.175.000	Rp 67.192.500	100%	DDS	
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Kal. Gari	Rp 3.000.000	Rp -	100%	PAD	
Peningkatan Kapasitas BAMUSKAL	Kal. Gari	Rp 2.000.000	Rp -	100%	PAD	
Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable	Kal. Gari	Rp 3.250.000	Rp -	100%	DDS	
Pembinaan dan Pengembangan Forum Anak	Kal. Gari	Rp 5.000.000	Rp 1.000.000	100%	DDS	
Penyelenggaraan Pameran Pembangunan/Promosi UMKM	Kal. Gari	Rp 10.000.000	Rp -	100%	DDS	
Pembinaan UMKM	Kal. Gari	Rp 4.300.000	Rp -	100%	DDS	
Bidang Penanggulangan Bencana						
Penanggulangan Keadaan Kebencanaan	Kal. Gari	Rp 15.000.000	Rp 8.900.000	100%	DDS	
Penanganan Keadaan Mendesak	Kal. Gari	Rp 152.000.000	Rp 133.200.000	100%	DDS	

B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan dan Prioritas Pembangunan

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Dalam Bidang penyelenggaraan pemerintah sebagian besar merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kalurahan sehingga dalam RPJM Kalurahan maupun RKP tidak banyak perubahan dan secara umum telah berjalan dengan baik sesuai dengan RPJM dan RKP Kalurahan. Begitu juga pada tahun rencana (n-1) hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya yang telah berjalan.

2. Bidang Pelaksanaan pembangunan

Dalam bidang pembangunan Kalurahan untuk tahun rencana (n-1) tetap akan berpedoman pada skala prioritas yang ada pada RPJM namun demikian, Dalam perencanaan pembangunan pada tahun rencana (n-1) pemerintah kalurahan melaksanakan musyawarah padukuhan untuk menjaring aspirasi warga menggali permasalahan yang ada ditingkat masyarakat padukuhan dengan tujuan perencanaan pada tahun rencana (n-1) ini lebih mengena dan lebih berfaat sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini.

Perencanaan pelaksanaan pembangunan pada tahun rencana (n-1) berdasar pada Pencermatan RPJM Kalurahan, residu prioritas pembangunan yang belum terlaksana, jaring aspirasi warga padukuhan melalui musyawarah padukuhan, program pembangunan dari pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten yang masuk ke kalurahan serta ketentuan penggunaan prioritas anggaran dari pemerintah pada tahun rencana (n-1). Pada tahun rencana (n-1) diharapkan anggaran terutama Dana Kalurahan bisa dimaksimalkan untuk pelaksanaan pembangunan secara maksimal meskipun dalam perencanaan masih dianggarkan juga untuk penanggulangan bencana terutama untuk program penyaluran BLT.

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

Program kegiatan pembinaan masyarakat secara umum relatif bisa dilaksanakan sesuai dengan RPJM Kalurahan pada tahun rencana (n-1). Pada tahun sebelumnya bidang pembinaan masyarakat terhambat adanya pandemi Covid-19 dengan adanya pembatasan-pembatasan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Dengan mulai terkendalinya pandemi covid-19 ditahun rencana (n-1) maka program-program kegiatan direncanakan bisa berjalan dengan baik.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Seperti halnya bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat secara umum bisa dilaksanakan sesuai dengan RPJM Kalurahan pada tahun rencana (n-1). Untuk mendorong Pemberdayaan Masyarakat bidang pemberdayaan masyarakat memiliki peran penting sehingga beberapa program

pelatihan ketrampilan dan pengembangan usaha masuk dalam prioritas kegiatan dibidang ini. hal ini sesuai dengan hasil jaring aspirasi warga melalui musyawarah padukuhan dalam rangka Penyusunan RKP Kalurahan tahun rencana (n-1), sehingga program kegiatan pada tahun rencana (n-1) lebih mengena dan bermanfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

5. **Bidang penanggulangan Bencana**

Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat di tengah gempuran ekonomi yang tak menentu, perlu adanya kebijaksanaan untuk menjaga perpuataran ekonomi, yakni dengan kebijakan untuk alokasi dana BLT (Bantuan Langsung Tunai). Hal ini dimaksudkan agar pada tahun rencana (n-1) anggaran dana bisa dimaksimalkan untuk pembangunan kalurahan. Namun hal ini tentu diimbangi dengan peningkatan anggaran, karena kalurahan sendiri telah memilik RPJMKal terkait dengan Pembangunan di Kalurahan Gari

BAB IV.
PRIORITAS PEMBANGUNAN HASIL PENCERMATAN
RPJMKAL TAHUN 2022-2028

A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 hingga 2022 memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk sektor pembangunan di Kalurahan Gari. Keterbatasan anggaran dan penundaan beberapa program pembangunan menjadi konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, memasuki tahun 2025, Pemerintah Kalurahan Gari berkomitmen untuk melakukan percepatan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMKal 2022-2027.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang tentang Pembangunan Desa bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa dan percepatan penanggulangan kemiskinan masyarakat Desa. Salah satu strategi percepatan pembangunan yang diimplementasikan adalah penetapan kebijakan prioritas pembangunan. Kebijakan ini difokuskan pada program dan kegiatan yang dapat diselesaikan di tingkat kalurahan dengan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan, seperti APBKal Tahun Anggaran 2025, APBD Kabupaten, dan APBD Provinsi.

Penetapan prioritas pembangunan Kalurahan Gari Tahun 2025 didasarkan pada *hasil pengumpulan data dan penjangkaran aspirasi masyarakat*. Beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan penjangkaran aspirasi masyarakat antara lain:

1. Pemetaan Geo Spasial

Teknologi pemetaan geo spasial dimanfaatkan untuk memetakan potensi dan permasalahan di setiap padukuhan. Data geo spasial ini mencakup informasi mengenai infrastruktur, fasilitas umum, kondisi lingkungan, dan sebagainya.

Dengan demikian, pemerintah kalurahan dapat mengidentifikasi kebutuhan pembangunan secara tepat sasaran. Misalnya, jika data geo spasial menunjukkan bahwa akses jalan di Padukuhan "x" masih buruk, maka pembangunan infrastruktur jalan di Padukuhan "x" dapat diprioritaskan.

2. **Musyawarah Dusun (Musdus)**

Musyawarah dusun menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan usulan program pembangunan. Usulan-usulan tersebut dikumpulkan dan dianalisis oleh pemerintah kalurahan untuk kemudian dipertimbangkan dalam penetapan prioritas pembangunan.

Contohnya, jika mayoritas warga di suatu dusun mengusulkan

3. **Musyawarah Kalurahan (Muskal)**

Musyawarah Kalurahan merupakan forum musyawarah yang lebih luas yang melibatkan perwakilan dari setiap dusun, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan kalurahan. Dalam forum ini, dilakukan pembahasan dan penajaman usulan program pembangunan yang telah dikumpulkan dari musyawarah dusun. Prioritas pembangunan kalurahan ditetapkan melalui musyawarah mufakat dalam forum ini.

4. **Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal)**

Musrenbangkal menjadi puncak dari proses perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan. Dalam forum ini, RKP Kalurahan dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah kalurahan, Bamuskal, dan segenap pemangku kepentingan di kalurahan. Prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan diintegrasikan ke dalam RKP Kalurahan melalui Musrenbangkal.

Melalui proses yang partisipatif dan transparan tersebut, Pemerintah Kalurahan Gari berharap dapat mewujudkan pembangunan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan serta memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh warga masyarakat.

Detail prioritas pembangunan Kalurahan Gari Tahun 2025 selanjutnya diuraikan dalam Format Rancangan Akhir RKP Kalurahan yang mencakup informasi mengenai program, kegiatan, lokasi, target, waktu pelaksanaan, anggaran, dan sumber pendanaan. (Format Rancangan Akhir RKP Kalurahan (Format V. 1)

NO	Bidang/Kegiatan	Volume	Perkiraanan Pagu	Lokasi/ Padukuhan	Ket
1	Pembangunan Talud	1 LS	Rp 30.000.000	Gatak	
2	Pembangunan Cor Rabat	1 LS	Rp 30.000.000	Ngijorejo	
3	Pembangunan Talud	1 LS	Rp 30.000.000	Jatirejo	
4	Pembangunan Cor Rabat	1 LS	Rp 30.000.000	Gari	
5	Pembangunan Talud	1 LS	Rp 30.000.000	Gari	
6	Pembangunan Talud	1 LS	Rp 30.000.000	Kalidadap	
7	Pembangunan Cor Rabat	1 LS	Rp 30.000.000	Gelung	
8	Pembukaan Jalan Baru	1 LS	Rp 30.000.000	Gelung	
9	Pembangunan Talud	1 LS	Rp 30.000.000	Tegal Rejo	
10	Pembangunan Talud	1 LS	Rp 30.000.000	Ngelorejo	
11	Pembukaan Jalan Baru	1 LS	Rp 30.000.000	Gondang Rejo	
12	Pembangunan Cor Rabat	1 LS	Rp 30.000.000	Gondang Rejo	
13	Pembangunan JUT	1 LS	Rp 30.000.000	Gari	
14	Pembangunan JUT	1 LS	Rp 30.000.000	Jatirejo	
Jumlah			Rp 420.000.000		

BAB V PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kalurahan) Gari Tahun 2025 kami susun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kalurahan) dengan proses perencanaan pembangunan partisipatif yaitu melibatkan masyarakat.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka RKP Kalurahan Tahun 2025 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam APBKAL 2025 nanti, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Kalurahan saling bekerjasama membangun Kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Kalurahan.

Diharapkan proses penyusunan RKP Kalurahan yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Kalurahan menuju pembangunan Kalurahan yang lebih maju. Selain itu, proses penyusunan RKP Kalurahan juga dapat dikontrol langsung oleh masyarakat dalam menerapkan Program/Kegiatan serta hasilnya dapat dievaluasi bersama-sama, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Bamuskal maupun warga masyarakat Kalurahan Gari.

Gari, 17 September 2024



4. Pada Bab II. Gambaran Umum dan Kebijakan Keuangan Kalurahan, Sub Bab A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah, nomor 1. Kondisi Geografis:
 - a. Paragraf pertama berisi: "... dari Kapanewon **Gari** ..." yang seharusnya ditulis "... dari Kapanewon **Wonosari**..."
 - b. Paragraf kedua "Orbitasi Kalurahan Gari: seharusnya "**Jarak ke ibu kota Kapanewon didahulukan nomor 1**", dilanjutkan jarak ke Ibukota Kabupaten lalu Provinsi.
5. Pada Bab II. Gambaran Umum dan Kebijakan Keuangan Kalurahan, Sub Bab. B. Kebijakan Keuangan Kalurahan, perlu diberi pendahuluan yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, kaidah pokok dan prioritas pengelolaan keuangan kalurahan di tahun 2025. Setelah pendahuluan tersebut dapat dilanjutkan tentang Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan. Kemudian perhatikan kolom dalam pencetakan agar tidak terpotong kegiatan - kegiatannya. Untuk semua tabel wajib mencantumkan kolom Realisasi Tahun 2023 (n+1); Berjalan Tahun 2024 (n); dan Proyeksi Tahun 2025 (n-1).
6. Bab III Evaluasi Kegiatan Pembangunan, Sub Bab A, Tabel 3.1 dan 3.2 belum ada. Mohon juga ditambahkan narasi terkait capaian target pembangunan, serta kendala yang muncul di lapangan sesuai dengan periode Tahun Berjalan 2024/n sesuai Tabel 3.1 dan Tahun 2023/n+1 sesuai tabel 3.2;
7. Bab IV Prioritas Program Pembangunan Kalurahan Tahun 2025, Lampiran Format V.1 Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kalurahan) belum sesuai dengan format yang ditentukan. Data anggaran kegiatan tahun berjalan (2024) harus dicantumkan dalam kolom Data Existing, dan target anggaran tahun perencanaan (2025) harus dicantumkan dalam kolom Target Capaian. Hal ini bertujuan untuk membandingkan dan melihat peningkatan output yang diharapkan dari kegiatan yang direncanakan
8. Pendanaan Kegiatan agar dihindari penggunaan dana lebih dari satu sumber, kecuali untuk kegiatan tertentu yang spesifik dan jelas batasan target kinerjanya serta dimungkinkan dalam regulasi yang berlaku.

Demikian hasil evaluasi ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, dan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Muh Setyawan Indriyanto, SH, M.Si
Pembina TK. I, IV/b
NIP. 195610401993031011

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH KALURAHAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
KALURAHAN GARI, KAPANEWON WONOSARI TAHUN 2025**

terkait dengan penyusunan RKP-Kalurahan Gari Tahun 2025, di Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta

hari dan Tanggal : **Senin, 08 Juli 2024**
jam : **pukul 13.00 WIB s/d selesai**
tempat : **Balai Kalurahan Gari**

telah dilaksanakan Musyawarah Kalurahan yang dihadiri oleh Lurah, Unsur Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), Perwakilan Lembaga Kalurahan dan Perwakilan Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Kalurahan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

- A. Materi :
 1. Pencermatan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan Gari periode 2022 s/d 2027.
 2. Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024.
 3. Profil dan Monografi Kalurahan Gari secara aktual.
- B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

1. Pemimpin Musyawarah	: Heri Santoso, S.Pd	: Ketua Bamuskal
2. Notulen	: Lilik Rahmad P, SH	: Carik
3. Narasumber	: Widodo, S.IP	: Lurah
	: Supriyadi, SE	: Kapanewon
	: Riswanta, S.Sos.	: Kapanewon

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Kalurahan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Kalurahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Gari Tahun 2025, yaitu :

1. Daftar Prioritas Kegiatan untuk Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Gari tahun 2025.
2. Susunan Tim Penyusun Rencana Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Gari tahun 2025
3. Menerima paparan prioritas kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Gari tahun 2025 dengan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

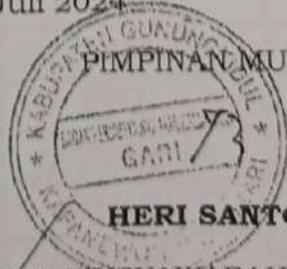
Gari, 08 Juli 2024



LURAH

WIDODO, S.IP, CPM, NLP

PERWAKILAN PESERTA MUSYAWARAH



PIMPINAN MUSYAWARAH

HERI SANTOSO, S.Pd

1. Bari Sumaranta
2. Kasdi
3. Suryanti

[Signature]

[Signature]

DAFTAR HADIR

tanggal : Senin, 8 Juli 2024
 : 13.00 - 15.00
 tempat : Balai Kelurahan Gar
 : Musyawarah Kelurahan Gar

NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
...tilah	Kader kesehatan	Tegarejo	1
Wiana Suprpti	Kader kb	Ngijorejo	2
... Etasari	Kader kb	Belung	3
...karmi	Agama Kristen	Gari	4
... Alifiah	Kader Kesehatan	Kali Bawap	5
...parkhani			6
...mantinah	Kader PAUD	Gari	7
...Putra Nugroho	Forum Anak Desa	Tegarejo	8
... Ari A	PD Wonoarini	Wonoarini	9
... HASINTHUGAN	PLD GARI	SURAMAU	10
...lasni	pkk. Gari		11
...haryana	LPMK	Gari	12
...dianto	Bamuskal	Ngelorejo	13
...ugiyono	Kap. Bamuskal	Jondoyun	14
...Putwanto	LPMK	Belung	15
... Sarwendah	PAUD	Jatirejo	16
... Wahyudi	Kap. Wonoarini	Wonoarini	17
... Suharyanti	Kader Kesehatan	Jatirejo	18
...letari	LPMK	Gari	19
...sadi	Talok Krayama	Gari	20
...y. h.	Wapareudi	Wonoarini	21
...s.	Jagabaya	Gari	22
...rimi	Ngelorejo	Kader	23
...miyah	PAUD	Ngelorejo	24
... Sumanjamb	CPMK	Gabal	25
...margiyun	KPM	GARI	26
SUROTO	LPMK	JATIREJO	27
...mialah	PKK	gelung	28
... Si Sumarni	Bamuskal	Jatirejo	29
... Suryanta	PKK	Tegarejo	30

NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
Widi.	Shp	Gari.	31
Agung	staf	Gajah	32
Tri Santoso	Bamuskel	Ngijorejo	33
Optian Nurmansal	Bumdes	Gari	34
Tri S	Bumdes	Kalidadap	35
Cahyaningsih	KPM	Gatale	36
Nurani	PKK	Bondang Rejo	37
Imah.	Dukuh	Bondang	38
Agianti	peader.		39
Agung	Kamuskel	Gari	40
Agung	Dukuh	Gari	41
Agung S	Dukuh	Gari	42
Agung	Gajah	Gajah	43
Agung	Dukuh	Ngijorejo	44
Agung H	Dukuh	Gari	45
Agung S	Dukuh	Ngijorejo	46
Agung Anindya	Kamituno	Gari	47
Agung H	Dukuh	Gajah	48
Agung	PKK	Gajah	49
Agung	Forum Anak	Gajah	50
Agung	Dukuh	Ngijorejo	51

Lurah Gari

WIDODO, S.I.P

c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
18	Pembinaan taman obat keluarga (TOGA)			3		V	Kal. Gari	6 LS	Rp	6.000.000	DDS			
19	Penyelenggaraan kesehatan lingkungan			3		V	Kal. Gari	6 LS	Rp	6.000.000	DDS			
20	Pemberian makanan tambahan balita/siswa PAUD			3		V	Kal. Gari	6 LS	Rp	72.000.000	DDS			
21	Penyusunan data kesehatan masyarakat			3,5		V	Kal. Gari	6 LS	Rp	6.000.000	DDS			
22	Pembinaan dan pengembangan kampung KB			1,3,5		V	Kal. Gari	6 LS	Rp	9.000.000	DDS			
23	Surveyland berbasis masyarakat			3,5		V	Kal. Gari	6 LS	Rp	6.000.000	DDS			
24	insentif kader kesehatan / KB			1,3,5		V	Kal. Gari	6 LS	Rp	298.080.000	DDS			
25	Pengembangan sanitasi terpadu berbasis masyarakat (STBM)			3		V	Kal. Gari	6 LS	Rp	6.000.000	DDS			
26	lain - lain sub bidang kesehatan													
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
1	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan			9		V	Kal. Gari	6 LS	Rp	40.000.000	DD/PBK/PBP			
2	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa			9		V	Kal. Gari	6 LS	Rp	35.000.000	PBK			
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **			9		V	Kal. Gari	6 LS	Rp	1.350.000.000	DD/PBK/PBP/AFBN			
4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **			9		V	Kal. Gari	6 LS	Rp	1.150.000.000	DD/PBK/PBP/AFBN			
5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **			9		V	Kal. Gari	6 LS	Rp	1.200.000.000	DD/PBK			
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Siab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **			9		V	Kal. Gari	6 LS	Rp	400.000.000	DD/PBK			
8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**			9		V	Kal. Gari	6 LS	Rp	300.000.000	DD/PBK			
9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan			9		V	Kal. Gari	1 LS	Rp	300.000.000	DD/PBK			
10	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **			9		V	Kal. Gari	6 LS	Rp	150.000.000	DD			
11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa			9		V	Kal. Gari	6 LS	Rp	50.000.000	DD			
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **			9		V	Kal. Gari	6 LS	Rp	700.000.000	DD/PBK			
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **			9		V	Kal. Gari	6 LS	Rp	300.000.000	DD			
15	Penyediaan sarana dan prasarana pemukiman milik desa			9		V	Kal. Gari	6 LS	Rp	50.000.000	DD			
16	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan tata ruang													
	Sub Bidang Kawasan Permukiman													
1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)			9,11		V	Kal. Gari	6 LS	Rp	360.000.000	DD			
2	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)			6,9,11		V	Kal. Gari	6 LS	Rp	150.000.000	DD			
5	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll			9,11		V	Kal. Gari	6 LS	Rp	15.000.000	DD			
6	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)			9,11		V	Kal. Gari	6 LS	Rp	15.000.000	DD			
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**			6,7		V	Kal. Gari	6 LS	Rp	450.000.000	DD			

Pelaksanaan Pembangunan Desa

e	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **	6,9					√	Kal. Gari	6 LS			Rp	200.000.000						DD/PBK/PBP	
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	6,9,11					√	Kal. Gari	1 LS			Rp	50.000.000						DD	
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	9						Kal. Gari	1 LS			Rp	150.000.000						DD/PBK	
18	pemberian stimulan jamban sehat	9					√	Kal. Gari	6 LS			Rp	50.000.000						DD	
20	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	6,11					√	Kal. Gari	6 LS			Rp	12.000.000						DD	
21	penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	9,11					√	Kal. Gari	6 LS			Rp	15.000.000						DD	
22	lain-lain sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman																		DD	
	Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup																			
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika																			
1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	9,17					√	Kal. Gari	6 LS			Rp	3.000.000						DD	
2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Balho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	9,17					√	Kal. Gari	6 LS			Rp	60.000.000						DD	
3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	9,17					√	Kal. Gari	6 LS			Rp	12.000.000						DD	
4	Pengelolaan radio komunitas milik desa	9,17					√	Kal. Gari	6 LS			Rp	5.000.000						DD	
5	Pengadaan sarana dan prasarana penerangan jalan desa /lingkungan permukiman	9,17					√	Kal. Gari	6 LS			Rp	50.000.000						DD/PBK	
6	lain - lain kegiatan sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika																			
	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral																			
1	pengembangan pariwisata desa	13,17,18					√	Kal. Gari	6 LS			Rp	300.000.000						DD/PBK	
	Sub Bidang Pariwisata																			
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **	1,17					√	Kal. Gari	6 LS			Rp	400.000.000						DD/PBK	
2	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	1,17					√	Kal. Gari	6 LS			Rp	60.000.000						DD/PBK/PBP	
3	Peningkatan kapasitas pengelola wisata milik desa	1,17					√	Kal. Gari	6 LS			Rp	20.000.000						DD	
4	Pembangunan/rehabilitasi rest area milik desa	15					√	Kal. Gari	6 LS			Rp	600.000.000						DD/PBK/PBP	
5	lain - lain kegiatan sub bidang pariwisata																			
Jumlah Per Bidang 2												Rp	9.393.280.000							

Pelaksanaan
Pembangunan
Desa

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat											
No	Uraian Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **	11	√	Kal. Gari	6 LS	Rp	5.000.000				PAD
2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	11	√	Kal. Gari	6 LS	Rp	10.000.000				PAD, PBH
3	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	11	√	Kal. Gari	6 LS	Rp	20.000.000				DD
4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	11	√	Kal. Gari	6 LS	Rp	10.000.000				DD
5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan/Bencana Skala Lokal Desa	11	√	Kal. Gari	6 LS	Rp	10.000.000				PAD, PBH
7	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	11	√	Kal. Gari	6 LS	Rp	5.000.000				PAD/ PBH
8	Pembinaan kelembagaan desa tangguh bencana	11	√	Kal. Gari	6 LS	Rp	10.000.000				PAD/ PBH
9	Pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat	11	√	Kal. Gari	6 LS	Rp	5.000.000				PAD/ PBH
11	Pembinaan jaga warga	11	√	Kal. Gari	6 LS	Rp	100.000.000				PBK
12	Penyelenggaraan desa bersih narkoba (desa Bersinar)	3,11	√	Kal. Gari	6 LS	Rp	5.000.000				PAD
13	Pengadaan seragam Linmas	11	√	Kal. Gari	1 LS	Rp	10.000.000				PAD/ PBK
15	Pengembangan desa/ kelompok sadar hukum	11	√	Kal. Gari	6 LS	Rp	5.000.000				PAD/ PBH
16	lain-lain kegiatan sub bidang ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.										
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan											
1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	18	√	Kal. Gari	6 LS	Rp	5.000.000				PAD/ PBH
2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota	18	√	Kal. Gari	6 LS	Rp	5.000.000				PAD/ PBH
3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	18	√	Kal. Gari	6 LS	Rp	300.000.000				PAD/ PBH
6	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	18	√	Kal. Gari	6 LS	Rp	5.000.000				PAD/ PBH
7	Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	18	√	Kal. Gari	6 LS	Rp	5.000.000				PAD/ PBH
8	Pelaksanaan upacara adat/ tradisi daerah tingkat desa	18	√	Kal. Gari	6 LS	Rp	60.000.000				PAD/ PBH/ BKK
9	Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	18	√	Kal. Gari	6 LS	Rp	50.000.000				BKK
10	Pembinaan lembaga desa pelestari adat	18	√	Kal. Gari	6 LS	Rp	15.000.000				PAD/ PBH
11	Pembinaan dan pengembangan desa budaya	18	√	Kal. Gari	6 LS	Rp	5.000.000				BKK
12	lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan										

3 Pembinaan Masyarakat Desa

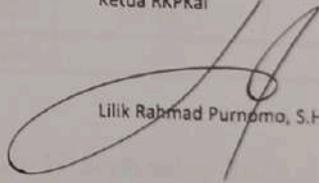
1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	3,18	V	Kal. Gari	6 LS	Rp	10.000.000	PAD/PBH	
2	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebugsaan, dll) tingkat Desa	4,1,1,16	V	Kal. Gari	6 LS	Rp	10.000.000	PAD/PBH/DLL	
3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	10	V	Kal. Gari	6 LS	Rp	10.000.000	PAD/PBH	
4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	3	V	Kal. Gari	6 LS	Rp	150.000.000	PAD/PBH/DLL	
5	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	18	V	Kal. Gari	6 LS	Rp	30.000.000	PAD/PBH/DLL	
6	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	16	V	Kal. Gari	6 LS	Rp	30.000.000	PAD/PBH/DLL	
7	Operasional karangtaruna	18	V	Kal. Gari	6 LS	Rp	30.000.000	PAD/PBH/DLL	
8	Lain - lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olah raga								
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat								
1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18	V	Kal. Gari	6 LS	Rp	30.000.000	PAD/PBH/DLL	
2	Pembinaan PKK	18	V	Kal. Gari	6 LS	Rp	30.000.000	PAD/PBH/DLL	
3	Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat desa	18	V	Kal. Gari	6 LS	Rp	30.000.000	PAD/PBH/DLL	
4	Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa	18	V	Kal. Gari	6 LS	Rp	10.000.000	PAD/PBH/DLL	
5	Pembinaan kader pemberdayaan desa	18	V	Kal. Gari	6 LS	Rp	10.000.000	PAD/PBH/DLL	
6	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	18	V	Kal. Gari	6 LS	Rp	40.000.000	PAD/PBH/DLL	
8	Pembinaan RT RW	18	V	Kal. Gari	6 LS	Rp	20.000.000	PAD/PBH/DLL	
9	Operasional LPMDdan/atau LPMD	18	V	Kal. Gari	6 LS	Rp	30.000.000	PAD/PBH/DLL	
10	Operasional PKK	18	V	Kal. Gari	6 LS	Rp	30.000.000	PAD/PBH/DLL	
11	Lain - lain sub bidang kelembagaan masyarakat								
Jumlah Per Bidang 3								1.015.000.000	

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal												
Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	8,17									
	2	Pembangunan gedung kantor Bumdes	8,17									
	3	Penyertaan modal bumdes	8,17									
	4	Lain- lain sub bidang dukungan penanaman modal										
		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian										
Jumlah Per Bidang 4	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **	8,17									
	2	Pengembangan Industri kecil level Desa	8,17									
	3	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	8,17									
	4	Pembinaan pedagang di lingkungan pasar	8,17									
	5	Lain-lain sub bidang perdagangan dan perindustrian	8,17									
Jumlah Per Bidang 4												
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak		Sub Bidang Penanggulangan Bencana										
	1	Penanggulangan Bencana	11,13									
	2	Sarana prasarana tanggap darurat bencana	11,13									
	3	Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana	11,13									
	4	Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana	11,13									
Jumlah Per Bidang 5		Sub Bidang Keadaan Darurat										
		Keadaan Darurat	11,13									
		Sub Bidang Keadaan Mendesak										
		Keadaan Mendesak										
	1	Bantuan Langsung Tunai (BLT) - Dana Desa (sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku)	11,13									
JUMLAH TOTAL	2	Bantuan Bahan Pangan/Sembako	11,13									
	3	Bantuan Pengobatan	11,13									
Jumlah Per Bidang 5												
JUMLAH TOTAL											Rp	22.495.204.880

DAFTAR USULAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2026

PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN DANA	KEMENTRIAN/SKI
Pemerintah Kabupaten	Jalan Kabupaten Gari-Karangtengah	Kal. Gari		LS	Rp 100.000.000	
	Pembangunan Jalan Gari-Ngijorejo	Kal. Gari		LS	Rp 100.000.000	
	Pembangunan Talud Drainase	Kal. Gari		LS	Rp 100.000.000	
	Pembangunan Jalan Lingkungan	Kal. Gari		LS	Rp 100.000.000	
Pemerintah Provinsi	Jalan Kabupaten Gari-Karangtengah	Kal. Gari		LS	Rp 100.000.000	
	Pengembangan Pariwisata Pasar Argowijil	Kal. Gari		LS	Rp 100.000.000	DAIS
	Pembangunan Embung Ngoro-oro	Kal. Gari		LS	Rp 100.000.000	DAIS
	Pembangunan UMKM Center "Bango Istimewa"	Kal. Gari		Ls	Rp 250.000.000	DAIS
	Padat Karya Tata Nilai Semangta Keyogyakartaan	Kal. Gari		Ls	Rp 200.000.000	DAIS
	Pelestarian Tradisi, Adat, dan Budaya	Kal. Gari		Ls	Rp 175.000.000	DAIS
	Perlindungan Tanah Kabupaten dan Tanah Kasultanan	Kal. Gari		LS	Rp 100.000.000	DAIS
Pemerintah Pusat	Jembatan gantung Gari-Kedung Keris	Kal. Gari		LS	Rp 1.000.000.000	
	Pengembangan Pariwisata Lingkungan Hidup	Kal. Gari		Ls	Rp 600.000.000	
JUMLAH					Rp 3.025.000.000	

Gari, 17 September 2024
Ketua RPKal



Lilik Rahmad Purnomo, S.H

Rencana Kegiatan Hasil Pencermatan RPJM Kalurahan

: GARI
 : WONOSARI
 : GUNUNGKIDUL
 : D. I. YOGYAKARTA

Bidang/Kegiatan	Volume	Perkiraanan Pagu	Lokasi/ Padukuhan	Ket
Pembangunan Talud	1 LS	Rp 30.000.000	Gatak	
Pembangunan Cor Rabat	1 LS	Rp 30.000.000	Ngijorejo	
Pembangunan Talud	1 LS	Rp 30.000.000	Jatirejo	
Pembangunan Cor Rabat	1 LS	Rp 30.000.000	Gari	
Pembangunan Talud	1 LS	Rp 30.000.000	Gari	
Pembangunan Talud	1 LS	Rp 30.000.000	Kalidadap	
Pembangunan Cor Rabat	1 LS	Rp 30.000.000	Gelung	
Pembukaan Jalan Baru	1 LS	Rp 30.000.000	Gelung	
Pembangunan Talud	1 LS	Rp 30.000.000	Tegal Rejo	
Pembangunan Talud	1 LS	Rp 30.000.000	Ngelorejo	
Pembukaan Jalan Baru	1 LS	Rp 30.000.000	Gondang Rejo	
Pembangunan Cor Rabat	1 LS	Rp 30.000.000	Gondang Rejo	
Pembangunan JUT	1 LS	Rp 30.000.000	Gari	
Pembangunan JUT	1 LS	Rp 30.000.000	Jatirejo	
Jumlah		Rp 420.000.000		

Gari, 17 September 2024
Ketua Tim Penyusun RKP

(LILIK RAHMAD PURNOMO S.H)

DFTAR USULAN RKP KALURAHAN

KALURAHAN : GARI
 KAPANEWON : WONOSARI
 KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
 PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	Bidang/Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Perkiraan Biaya	Sumber Pembiayaan	
A Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa							
1							
JUMLAH BIDANG A							0
B Bidang Pembangunan Desa							
1	Alun-Alun Kalurahan Gari	Kal.Gari	1 Ls				
2	Pembangunan Embung Desa	Kal.Gari	1 Ls		Rp 175.000.000	DAIS	
3	Pembukaan Jalan Baru (Gatak-Gondang)	Kal.Gari	1 Ls		Rp 150.000.000	APBD DIY	
4	Pembangunan Talud	Kal.Gari	1 Ls		Rp 50.000.000	APBD DIY	
5	Pembangunan Cor Rabat	Kal.Gari	1 Ls		Rp 30.000.000	APBD KAB	
6	Pembangunan JUT	Kal.Gari	1 Ls		Rp 30.000.000	APBD KAB	
7	Pembangunan Sport Center	Kal.Gari	1 Ls		Rp 30.000.000	APBD KAB	
JUMLAH BIDANG B							7
C Bidang Pembinaan Kemasyarakatan							
Peningkatan Kapasitas Pemerintah							
1	Kalurahan Gari dan Lembaga Kalurahan Gari	Kal.Gari	1 Ls		Rp 50.000.000	APBD DIY	
2	Pembinaan Karang Taruna	Kal.Gari	1 Ls		Rp 20.000.000	APBD DIY	
3	Pembinaan Forum Anak	Kal.Gari	1 Ls		Rp 20.000.000	APBD DIY	
JUMLAH BIDANG C							3
D Bidang Pemberdayaan Masyarakat							
1	Pelatihan Pembuatan WEB	Kal.Gari	1 Ls		Rp 30.000.000	APBD DIY	
2	Pelatihan Designer	Kal.Gari	1 Ls		Rp 30.000.000	APBD DIY	
3	Pelatihan Affiliate Marketing	Kal.Gari	1 Ls		Rp 30.000.000	APBD DIY	
JUMLAH BIDANG D							3

Mengetahui,
 Lurah Gari

(WIDODO S.IP)

Gari, 17 September 2024
 Ketua Tim Penyusun RKP

(LILIK RAHMAD PURNOMO S.H)

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
KALURAHAN GARI, KAPANEWON WONOSARI TAHUN 2025**

Berkaitan dengan penyusunan RKP-Kalurahan Wonosari Tahun 2025, di Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada:

Hari dan Tanggal : **Kamis, 05 September 2024**
Jam : **pukul 09.00 WIB s/d selesai**
Tempat : **Balai Kalurahan Gari**

Telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang dihadiri oleh Lurah, Unsur Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), Perwakilan Lembaga Kalurahan dan Perwakilan Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Kalurahan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi :

1. Rancangan Awal RKP 2025.
2. DURKP 2026.
3. Proyeksi Pendapatan Tahun 2025.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

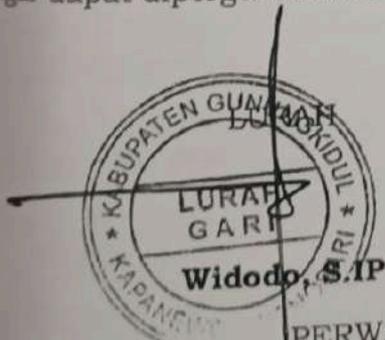
- | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------|
| 1. Pemimpin Musyawarah | : Dwi Sumaryanta, S.Pd | : LPMK |
| 2. Pembawa acara | : Lilik Rahmad Purnomo, S.H | : Carik |
| 3. Narasumber | : Widodo, S.IP | : Lurah |
| | : Riswanta, S.Sos | : Kapanewon |

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Kalurahan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Gari Tahun 2025, yaitu :

1. Rancangan RKP 2025.
2. Rancangan DURKP 2026
3. Risalah Musrenbangkal dipublikasikan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gari, 5 September 2024



PIMPINAN MUSYAWARAH

Dwi Sumaryanta S,Pd

PERWAKILAN PESERTA MUSYAWARAH

1. Wassgiyand
2. Mansiyam
3. Any ARIPAH

CPN

DAFTAR HADIR

Kamis, 15 September 2024
 09:00
 Balai Kematian Cori
 Pujawarah Rencana Pembangunan Kabupaten

TTD	UNSUB	NAMA
	My Basmikal	Tugilawa
	LPMKor	SURORO
	Basmikal	M. S. G. L. O. W.
	Kader Postanda	Sumartinah
	Staff	Agus Rahmawati
	Andang Firdah	Nugayem
	PKR	Geolij Susman
	Kader kb	Sulli Setiawati
	TPM	Xuliana Anggrah
	KPM	Marsyom
	KRM	Danik Estans
	Basmikal	Widadiyanto
	Ka/teman	Al/rodo
	Hub	Al/rodo
	Pod.	UMI Widiasth
	PKR	BETRI MUR YANI
	PKR LAS	ST Sukaryadi
	PKR	Syosmi
	KPM	Nur Cahya
	PKR	Burhan
	Dikuh	Pinu Nurrah
	Kar Sub	Supatini
	Basmikal	Sugiyanti
	PKR	Kt. Suwanti
	210-010	Hani Kusumah
	PD	Suci Aul
	PD	Alvianita
	PKR GARI	Pratiwi
	Dulul	Anik Kurni
	Konk	Wawa A.
	Duluh	Susanto
	Duluh	Welle N
	Basmikal	Burhan
	TL	Ratnan Dwi Eko Alharub